VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI GORONTALO

Ismet Sulila[1)]*, Vivi Venti Vera Sulila[2)]

[1] Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
ismet.sulila@ung.ac.id
[2] Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
viviventivera@ung.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, terutama ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kemiskinan, serta kebutuhan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Collaborative Governance* dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumentasi. Data diperoleh melalui penelaahan artikel ilmiah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta publikasi statistik resmi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance* yang menekankan kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan perguruan tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Tantangan utamanya meliputi ketimpangan kapasitas antarpemangku kepentingan, koordinasi kelembagaan, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan kesinambungan program. Oleh karena itu, penguatan forum kolaborasi, keterbukaan informasi, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi partisipatif diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih merata, responsif, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pembangunan Daerah, Inklusivitas, Keberlanjutan

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

Regional development is a process that should not only focus on economic growth but also consider equitable welfare, community participation, and environmental sustainability. Gorontalo Province continues to face several development challenges, particularly welfare disparities between urban and rural areas, poverty, and the need to strengthen coordination among stakeholders. This study aims to analyze the role of Collaborative Governance in supporting inclusive and sustainable regional development in Gorontalo Province and identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employs a qualitative descriptive approach through library research and document analysis. Data were collected by reviewing scientific articles, regional development planning documents, and official statistical publications. The analysis applies the Collaborative Governance framework, emphasizing initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The review indicates that inclusive and sustainable development requires active participation from government institutions, communities, the private sector, and universities in policy planning, implementation, and evaluation. The main challenges include unequal stakeholder capacities, institutional coordination, limited community participation, and program continuity. Therefore, strengthening collaborative forums, ensuring information transparency, establishing clear role distribution, and implementing participatory evaluation are necessary to promote more equitable, responsive, and sustainable regional development in Gorontalo Province.

Keywords: Collaborative Governance, Regional Development, Inclusiveness, Sustainability

.

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, pembangunan tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap pelayanan publik, penguatan kapasitas masyarakat, pengurangan ketimpangan sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan melibatkan berbagai aktor dalam proses penyelenggaraannya.

Perkembangan paradigma pemerintahan menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan government menuju governance. Dalam pendekatan government, pemerintah cenderung menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, governance menempatkan pemerintah sebagai salah satu aktor yang bekerja bersama masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan pemerintah secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama dan pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam paradigma governance adalah *Collaborative Governance*. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan pengaturan pemerintahan yang melibatkan lembaga publik secara langsung dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan aktor nonpemerintah melalui forum formal, berorientasi pada konsensus, dan bertujuan menghasilkan kebijakan atau keputusan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya dimaknai sebagai hubungan koordinasi antarlembaga, tetapi sebagai proses bersama dalam menentukan dan melaksanakan arah pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, *Collaborative Governance* memiliki peran strategis karena setiap wilayah mempunyai karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi, serta kontribusi perguruan tinggi dalam penyediaan pengetahuan dan inovasi. Apabila seluruh aktor tersebut dapat terlibat secara seimbang, kebijakan pembangunan berpeluang menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pembangunan dalam sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan sumber daya alam. Potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan potensi daerah perlu didukung oleh tata kelola pembangunan yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat telah memperoleh manfaat pembangunan secara merata.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, perekonomian Gorontalo pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 %. Di sisi lain, persentase penduduk miskin pada September 2025 masih mencapai 12,62 % atau sekitar 155,76 ribu jiwa. Perbedaan kondisi kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan juga memperlihatkan adanya persoalan pemerataan, yaitu sebesar 4,46 % di wilayah perkotaan

dan 19,86 % di wilayah perdesaan (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan sumber daya pembangunan.

Selain persoalan kemiskinan, pembangunan daerah juga menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan koordinasi antarpemangku kepentingan. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah membutuhkan keterpaduan perencanaan, pembagian kewenangan, serta kesinambungan pelaksanaan. Apabila koordinasi belum berjalan secara optimal, terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih program, ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan, serta belum meratanya manfaat kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme tata kelola yang dapat mengintegrasikan kepentingan dan sumber daya berbagai aktor pembangunan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki landasan perencanaan pembangunan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan arah, prioritas, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, pencapaian tujuan pembangunan memerlukan dukungan berbagai pihak agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memperoleh partisipasi dan dukungan dari masyarakat serta aktor pembangunan lainnya.

Pembangunan inklusif sebagai pembangunan yang memberikan kesempatan kepada seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara adil tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua konsep tersebut mempunyai hubungan yang erat karena pembangunan yang tidak inklusif dapat memperbesar ketimpangan, sedangkan pembangunan yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan kerusakan sumber daya dan menghambat kesejahteraan jangka panjang.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan kerangka integratif *Collaborative Governance* yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh konteks sistem, dinamika kolaborasi, serta tindakan bersama yang menghasilkan dampak dan penyesuaian. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi membutuhkan kapasitas bersama, legitimasi, kepercayaan, dan komitmen yang dibangun secara berkelanjutan. Hal ini relevan dengan pembangunan daerah karena keterlibatan berbagai aktor harus disertai kemampuan untuk menyatukan kepentingan, mengelola perbedaan, dan menentukan prioritas pembangunan secara bersama.

Penelitian Afandi et al. (2023) mengenai kolaborasi dalam penanganan stunting di tingkat lokal menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi yang bersifat formal belum tentu menjamin keterlibatan aktor nonpemerintah secara substantif. Apabila proses kolaborasi masih didominasi oleh pemerintah, partisipasi masyarakat dan aktor lainnya berpotensi hanya menjadi pelengkap program. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya membangun kolaborasi yang memberikan ruang pengambilan keputusan secara lebih setara.

Selanjutnya, Kurniasih, Yusuf, dan Saputra (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan pemerintahan kolaboratif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan hubungan antaraktor. Sementara itu, Wibawa dan Nur'aini (2020) menekankan pentingnya kerangka *Collaborative Governance* dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua kajian tersebut

memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan kerja sama yang efektif dan berorientasi pada tujuan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai *Collaborative Governance* dalam pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo menjadi penting untuk dilakukan. Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan keberlanjutan lingkungan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan berbagai aktor secara aktif dan bertanggung jawab. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran *Collaborative Governance* dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta merumuskan strategi penguatan tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan konsep *Collaborative Governance* dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Penelitian difokuskan pada analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Provinsi Gorontalo yang mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada kepentingan untuk memahami pembangunan daerah dalam lingkup provinsi serta melihat kebutuhan koordinasi pembangunan antardaerah.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, publikasi Badan Pusat Statistik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sumber utama yang digunakan meliputi teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), kerangka integratif Emerson et al. (2012), publikasi Provinsi Gorontalo dalam Angka, serta Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, identifikasi dokumen yang relevan, pencatatan informasi penting, dan pengelompokan data berdasarkan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Penyajian data dilakukan secara deskriptif melalui pengelompokan tema mengenai proses kolaborasi, peran pemangku kepentingan, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dokumen dan literatur dengan kerangka teori *Collaborative Governance* untuk menghasilkan pemahaman mengenai strategi penguatan kolaborasi pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo

Pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi

ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta penguatan pelayanan publik. Provinsi Gorontalo memiliki enam wilayah administrasi kabupaten/kota dengan karakteristik sosial, ekonomi, geografis, dan potensi sumber daya yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan kebutuhan pembangunan setiap wilayah tidak selalu sama sehingga diperlukan perencanaan yang mampu mengakomodasi kepentingan dan karakteristik masing-masing daerah.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mencapai 5,71 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama dengan indikator kesejahteraan masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana manfaat pembangunan dirasakan secara luas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu secara langsung mencerminkan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap pelayanan dasar bagi seluruh kelompok masyarakat.

Persoalan tersebut dapat dilihat melalui kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Pada September 2025, persentase penduduk miskin mencapai 12,62 % dengan jumlah sekitar 155,76 ribu jiwa. Selain itu, terdapat perbedaan persentase kemiskinan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Persentase kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 4,46 %, sedangkan di perdesaan mencapai 19,86 % (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2026).

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian terhadap pemerataan manfaat pembangunan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan. Akses terhadap lapangan pekerjaan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan di tingkat lokal, sektor swasta untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi yang bertanggung jawab, serta perguruan tinggi untuk menyediakan kajian dan rekomendasi berbasis pengetahuan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi penting agar program pembangunan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. *Collaborative Governance* sebagai Pendekatan dalam Pembangunan Daerah

Collaborative Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* melibatkan lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam forum bersama yang berorientasi pada konsensus. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keputusan yang tidak hanya berdasarkan kewenangan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan berbagai pihak.

Dalam pembangunan daerah, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang memiliki keterkaitan lintas sektor. Misalnya, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani urusan sosial, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, dunia usaha, dan masyarakat. Demikian pula pengelolaan lingkungan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Emerson et al. (2012) menjelaskan bahwa proses *Collaborative Governance* dibentuk oleh dinamika kolaborasi yang meliputi keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Ketiga unsur tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun kerja sama pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Pertama, keterlibatan berprinsip menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengidentifikasi permasalahan, serta berpartisipasi dalam menentukan keputusan. Dalam konteks Gorontalo, masyarakat perlu memperoleh ruang yang memadai dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Kedua, motivasi bersama berkaitan dengan pembentukan kepercayaan, pemahaman, dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah dan masyarakat perlu mempunyai pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan sehingga pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga pada kebutuhan publik.

Ketiga, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, pengetahuan, kewenangan, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan anggaran, masyarakat memberikan pengetahuan mengenai kondisi lokal, sektor swasta mendukung kegiatan ekonomi, sedangkan perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat tata kelola pembangunan di Provinsi Gorontalo karena mampu menghubungkan berbagai sumber daya dan kepentingan dalam satu proses pembangunan yang lebih terintegrasi.

3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Kolaborasi tidak cukup hanya dengan membentuk forum atau menyelenggarakan pertemuan, tetapi perlu diwujudkan melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan kontribusi yang jelas. Adapun peran masing-masing aktor dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemerintah sebagai fasilitator dan pengarah Pembangunan

Pemerintah daerah mempunyai peran utama dalam menyediakan regulasi, menetapkan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga berperan mengoordinasikan kebijakan pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota agar program yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dan kesinambungan.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Peran tersebut diperlukan untuk mengurangi dominasi kelembagaan dan mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif.

b. Masyarakat sebagai subjek dan mitra Pembangunan

Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak

seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, kelompok masyarakat, organisasi sosial, serta kegiatan pengawasan berbasis komunitas. Keterlibatan tersebut penting agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Sektor swasta sebagai mitra pengembangan ekonomi

Sektor swasta mempunyai potensi dalam mendukung pembangunan melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks Gorontalo, keterlibatan dunia usaha dapat diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata.

Namun, keterlibatan sektor swasta perlu diarahkan melalui prinsip tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya.

d. Perguruan tinggi sebagai penyedia pengetahuan dan inovasi

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyediakan hasil penelitian, kajian kebijakan, pengembangan teknologi, serta pendampingan masyarakat. Keterlibatan akademisi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan pembangunan berdasarkan data dan kajian ilmiah.

Selain itu, perguruan tinggi dapat menjadi mitra dalam mengevaluasi program pembangunan, mengembangkan inovasi pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga memiliki landasan akademis.

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam *Collaborative Governance* Pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo

No.	Aktor	Peran dalam pembangunan
1	Pemerintah daerah	Menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, mengoordinasikan program, dan melakukan evaluasi.
2	Masyarakat	Menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam perencanaan, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan.
3	Sektor swasta	Mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha lokal, dan menerapkan tanggung jawab sosial.
4	Perguruan tinggi	Menyediakan penelitian, rekomendasi kebijakan, inovasi, dan pendampingan masyarakat.

5	Organisasi masyarakat sipil	Melakukan advokasi, pemberdayaan, pengawasan sosial, dan memperjuangkan kepentingan kelompok rentan.

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan daerah memerlukan pembagian peran yang saling mendukung. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, tetapi keberhasilan implementasinya juga bergantung pada partisipasi masyarakat dan kontribusi aktor nonpemerintah. Oleh karena itu, setiap pihak perlu memperoleh ruang keterlibatan yang proporsional agar kolaborasi dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas.

4. Penerapan *Collaborative Governance* untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan inklusif menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, prinsip tersebut perlu diarahkan pada pengurangan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, peningkatan akses pelayanan dasar, serta pemberdayaan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan sosial dan ekonomi.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tingginya persentase kemiskinan di perdesaan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dapat membangun kolaborasi dengan kelompok tani, nelayan, koperasi, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Melalui kolaborasi tersebut, program pembangunan dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan masyarakat, penguatan akses pasar, pendampingan usaha, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan rantai nilai ekonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.

Selain itu, pembangunan inklusif juga perlu memperhatikan kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok tersebut dilibatkan dalam proses perencanaan dan memperoleh akses yang setara terhadap program pembangunan.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, keterlibatan kelompok rentan menjadi penting karena keputusan pembangunan yang hanya melibatkan aktor dominan berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi. Oleh sebab itu, forum kolaborasi perlu diselenggarakan secara terbuka, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang seimbang bagi seluruh kelompok masyarakat.

Penelitian Afandi et al. (2023) memperlihatkan bahwa kolaborasi yang hanya bersifat formal dapat membatasi keterlibatan aktor nonpemerintah. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak cukup hanya dibuktikan melalui kehadiran dalam kegiatan pemerintah, tetapi harus terlihat dari keterlibatan mereka dalam menentukan prioritas, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Dengan demikian, penerapan *Collaborative Governance* di Provinsi Gorontalo perlu diarahkan pada penguatan partisipasi yang substantif. Pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme komunikasi yang terbuka dan memastikan bahwa aspirasi

masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

5. Penerapan *Collaborative Governance* dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks daerah, pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta kualitas lingkungan hidup.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi, terutama pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut perlu disertai pengelolaan yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya yang sama.

Salah satu contoh persoalan yang membutuhkan pendekatan kolaboratif adalah pengelolaan Danau Limboto. Permasalahan lingkungan pada kawasan danau tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan satu instansi karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat, pemanfaatan lahan, pengelolaan limbah, kegiatan ekonomi, serta koordinasi lintas wilayah dan sektor. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat sekitar danau, akademisi, organisasi lingkungan, dan pelaku usaha.

Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan melalui penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan dan koordinasi program pemulihan. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pengawasan lingkungan, pengurangan pencemaran, dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Perguruan tinggi dapat menyediakan kajian ilmiah mengenai kondisi ekosistem, sedangkan sektor swasta dapat mendukung kegiatan ekonomi yang memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Kolaborasi juga diperlukan dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Aktivitas ekonomi pada kedua sektor tersebut perlu memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, pengelolaan limbah, peningkatan kapasitas produksi, serta perlindungan terhadap lingkungan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas ekonomi tidak harus mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Wibawa dan Nur'aini (2020) menekankan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerangka kolaborasi yang mampu menghubungkan berbagai aktor dan kepentingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan sektoral, tetapi membutuhkan integrasi program dan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, *Collaborative Governance* dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo melalui penyatuan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap program pembangunan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan sumber daya daerah.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* di Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dapat memperkuat maupun menghambat proses kerja sama. Ansell dan Gash (2008)

mengidentifikasi beberapa faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi.

Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat beberapa faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam penguatan kolaborasi pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.

a. Faktor pendukung

Pertama, adanya kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan dalam menyelaraskan arah pembangunan dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Kedua, tersedianya potensi sumber daya daerah. Potensi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan sumber daya manusia dapat menjadi dasar pengembangan program pembangunan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Ketiga, keberadaan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Kedua unsur tersebut dapat mendukung proses kolaborasi melalui penelitian, pendampingan, pemberdayaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Keempat, adanya kebutuhan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi kepentingan bersama yang mendorong berbagai aktor untuk membangun kerja sama.

b. Faktor penghambat

Pertama, ketimpangan kapasitas dan sumber daya antarpemangku kepentingan. Tidak semua aktor memiliki kemampuan, akses informasi, dan sumber daya yang sama untuk terlibat dalam proses kolaborasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

Kedua, koordinasi kelembagaan yang belum terintegrasi. Banyaknya perangkat daerah dan aktor pembangunan dapat menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan program, membagi kewenangan, serta menentukan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ketiga, partisipasi masyarakat yang belum tentu bersifat substantif. Keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan tidak selalu menjamin bahwa aspirasi mereka akan diakomodasi dalam keputusan akhir. Apabila ruang partisipasi hanya bersifat formal, tujuan pembangunan inklusif akan sulit diwujudkan.

Keempat, keberlanjutan komitmen dan program kolaborasi. Perubahan prioritas, keterbatasan anggaran, dan pergantian kepemimpinan dapat memengaruhi kesinambungan kerja sama antarpemangku kepentingan.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance*

No.	Aspek	Faktor pendukung	Faktor penghambat
1	Kelembagaan	Adanya dokumen perencanaan dan regulasi pembangunan.	Koordinasi dan pembagian kewenangan belum selalu terintegrasi.
2	Sumber daya	Potensi ekonomi, sumber daya manusia, dan dukungan akademisi.	Ketimpangan kapasitas dan keterbatasan sumber daya.

3	Partisipasi	Adanya ruang musyawarah dan forum konsultasi publik.	Partisipasi masyarakat berpotensi hanya bersifat formal.
4	Komitmen	Adanya kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan.	Perubahan prioritas dan kesinambungan program.
5	Informasi	Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan.	Perbedaan akses dan keterbukaan informasi antarpihak.

Sumber: Diolah Peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan kapasitas kerja sama di antara mereka. Kolaborasi yang efektif membutuhkan kepercayaan, keterbukaan informasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian perbedaan kepentingan.

7. Strategi Penguatan *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, penerapan *Collaborative Governance* perlu didukung oleh strategi yang terarah dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Strategi tersebut harus mampu menjawab persoalan koordinasi, partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Pertama, memperkuat forum kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mengoptimalkan forum koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menyepakati prioritas, membagi tanggung jawab, dan menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bersama.

Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat perdesaan, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Ketiga, memperkuat integrasi data dan keterbukaan informasi. Ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses dapat membantu seluruh aktor memahami kondisi pembangunan serta menentukan langkah yang tepat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme berbagi informasi antarlembaga agar perencanaan dan pelaksanaan program tidak berjalan secara terpisah.

Keempat, meningkatkan kontribusi sektor swasta dan perguruan tinggi. Keterlibatan dunia usaha perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Sementara itu, perguruan tinggi perlu dilibatkan dalam penyediaan kajian kebijakan, evaluasi program, dan inovasi pembangunan berbasis kebutuhan daerah.

Kelima, membangun sistem evaluasi kolaboratif. Evaluasi pembangunan sebaiknya tidak hanya dilakukan berdasarkan capaian administratif dan realisasi anggaran, tetapi juga

memperhatikan dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya perlu menilai apakah pembangunan telah meningkatkan akses pelayanan, mengurangi ketimpangan, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Tabel 3. Strategi Penguatan *Collaborative Governance* di Provinsi Gorontalo

No.	Strategi	Bentuk pelaksanaan	Hasil yang diharapkan
1	Penguatan forum kolaborasi	Membentuk atau mengoptimalkan forum lintas sektor dan lintas wilayah.	Koordinasi pembangunan lebih terintegrasi.
2	Peningkatan partisipasi masyarakat	Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.	Kebijakan lebih responsif dan inklusif.
3	Integrasi data dan informasi	Mengembangkan pertukaran data antarpemangku kepentingan.	Perencanaan lebih tepat sasaran dan transparan.
4	Kemitraan ekonomi dan akademik	Melibatkan sektor swasta dan perguruan tinggi dalam program pembangunan.	Penguatan ekonomi lokal dan inovasi daerah.
5	Evaluasi partisipatif	Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Pembangunan lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Sumber: Diolah Peneliti.

Strategi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan *Collaborative Governance* perlu dilakukan melalui langkah yang saling berkaitan. Forum kolaborasi harus diikuti dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, ketersediaan informasi, partisipasi yang bermakna, serta evaluasi terhadap dampak pembangunan. Tanpa adanya kesinambungan antartahapan tersebut, kolaborasi berpotensi hanya menjadi kegiatan koordinasi administratif yang belum menghasilkan perubahan nyata.

Secara keseluruhan, *Collaborative Governance* dapat menjadi pendekatan penting dalam memperkuat pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen setiap aktor untuk membangun hubungan kerja sama yang setara, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan penguatan tata kelola kolaboratif, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

SIMPULAN

Collaborative Governance merupakan pendekatan tata kelola yang penting dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Kompleksitas permasalahan pembangunan, seperti kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan, pemerataan akses pelayanan, dan pengelolaan lingkungan, membutuhkan

keterlibatan berbagai aktor yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah secara sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

Kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kelembagaan, keterbukaan informasi, kepercayaan, komitmen bersama, pembagian peran, dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Di sisi lain, ketimpangan kapasitas antarpemangku kepentingan, koordinasi yang belum terintegrasi, partisipasi yang masih berpotensi formal, serta kesinambungan program menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, keberadaan forum kolaborasi saja belum cukup apabila tidak disertai keterlibatan aktif dan tanggung jawab nyata dari setiap aktor.

Penguatan *Collaborative Governance* di Provinsi Gorontalo perlu diarahkan pada optimalisasi forum lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi data pembangunan, pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi, serta pelaksanaan evaluasi secara partisipatif. Melalui langkah tersebut, pembangunan daerah diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesempatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya pembangunan yang menunjukkan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat dan tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). *Collaborative Governance* in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *International Journal of Public Administration*. https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance* in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2026). *Provinsi Gorontalo dalam angka 2026*. BPS Provinsi Gorontalo. https://gorontalo.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2026). *September 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 12,62 persen*. BPS Provinsi Gorontalo. https://gorontalo.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1154/september-2025--persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-gorontalo-sebesar-12-62-persen.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2026). *Ekonomi Gorontalo tahun 2025 tumbuh 5,71 persen*. BPS Provinsi Gorontalo. https://gorontalo.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1162/gorontalo-s-economy-in-2025-grew-by-5-71-percent.html

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for *Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Kurniasih, D., Yusuf, M., & Saputra, A. S. (2023). The era of collaborative management: Navigating the challenges faced by Indonesian local governments. *Jurnal Studi Pemerintahan, 14*(3), 283–304. https://doi.org/10.18196/jsp.v14i3.332

Pemerintah Provinsi Gorontalo. (2025). *Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/330505

Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Fadhlia, M. N. (2022). Analisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal, 5*(2). https://doi.org/10.24905/igj.v5i2.66

Wibawa, S., & Nur'aini, D. A. (2020). *Collaborative Governance* in achieving sustainable development goals: A conceptual framework. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, 1*(1)

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

TENTANG PENULIS